

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dan berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangannya dinamika politik Indonesia telah melahirkan beberapa tipologi partai politik Islam. Meski hanya mengerucut pada dua tipologi yaitu pragmatis dan doktiner namun ini secara tidak langsung berdampak pada konstelasi ditingkat pembentukan kebijakan publik.

Tipologi pragmatis dan doktiner ini sendiripun muncul karena adanya perubahan ditingkat kepemimpinan dan target-target capaian politik yang dikejar masing-masing parpol Islam. Disamping itu, meski ditingkat nasional parpol Islam begitu varian namun kehadirannya kurang dirasakan oleh masyarakat akar rumput sebagai representasi aspirasi politik mereka.

1. Adapun tipologi partai-partai politik Islam di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua ideologi yaitu : Pragmatis dan Doktiner. Kelompok Pragmatis yaitu PPP sedangkan kelompok doktiner adalah PKS.

2. Polarisai antara partai politik Islam muncul pada saat presiden Joko Widodo hendak mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang UU Ormas. PKS dan PPP mengambil langkah bersebrangan, di satu sisi PPP mendukung pengesahan UU Ormas tersebut dengan alasan adanya kegentingan negara akibat hadirnya ormas yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila sedangkan PKS menolak dengan tegas Perppu Ormas tersebut dengan alasan tidak memenuhi urgensi kegentingan yang memaksa.
3. Dalam pandangan masyarakat, parpol Islam di Indonesia pasca reformasi ini cenderung oportunistis-pragmatis dikarenakan terlalu menitikberatkan pada peroleh suara elektoral semata, kondisi pragmatisme ini pun di ikuti dengan kenyataan bahwa masyarakat Islam di Indonesia hanya sosiologis semata bukan ideologis.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mencoba memberikan saran berikut ini, diantaranya:

1. Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem multi partai dalam menjalankan kehidupan kepartaiannya

yang tidak jarang menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan, hal demikian terjadi karena tidak sesuai dengan budaya politik Indonesia pada saat itu. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah perlu mencari ketidakstabilan tersebut, ketidakstabilan politik/pemerintahan sangat ditentukan oleh tingkat kompetitif dan antagonisme antar partai-partai politik yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diciptakan sistem kepartian yang berdasarkan konsesus, yakni kesamaan sikap dalam memandang persoalan, sehingga nantinya sistem ini mampu membentuk pemerintahan yang stabil.

2. Untuk Partai Politik Islam sendiri hendaknya secara struktur memberikan edukasi politik yang bersih bagi masyarakat, dengan cara-cara pendekatan langsung ataupun tidak langsung dengan memberikan keteladanan dan mencontohkan sebuah etika politik Islam agar terbangun kepercayaan antara basis konsituen dengan elit partai. Lebih jauh lagi adanya kesamaan kelompok dari beberapa partai politik, seharusnya diikuti dengan berfusinya partai-partai tersebut menjadi satu partai, hal ini dirasa lebih efektif mengingat semakin banyak partai politik yang lahir maka

semakin sedikit masa pendukung tiap-tiap partai tersebut. Satu hal menjadi catatan penting bagi Partai Politik Islam hendaknya merumuskan platform politik dan agenda politik yang tegas sesuai dengan asas Islam agar basis konsituennya mudah untuk mengidentifikasi dirinya kepada Parpol Islam tersebut.

3. Kepada masyarakat Indonesia khususnya kalangan pemilih Muslim hendaknya dengan tidak ikut terbawa arus politik pragmatis dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada parpol-parpol Islam, dengan melandaskan diri pada aspek nilai-nilai akidah Islam dalam menentukan pilihannya di setiap pelaksanaan pemilu.